

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : III
Rapat ke- : 5
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan:
1. Direktur Jenderal Hortikultura dan Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian;
2. Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Selasa, 19 Januari 2021
Waktu : 10.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.

Acara : Membahas Permasalahan Ekspor dan Impor Produk Hortikultura

Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. 45 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir:
1. Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian);
2. Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D. (Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian);
3. Yuli Sri Wilanti (Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Hortikultura Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian); dan
4. Heru Pambudi (Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan).

I. PENDAHULUAN

RDP Komisi IV DPR RI dengan Direktur Jenderal Hortikultura dan Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian; Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan membahas Permasalahan Ekspor dan Impor Produk Hortikultura, dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI meminta Badan Karantina Pertanian untuk kembali fokus ke Tugas dan Fungsi utamanya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yaitu mencegah tangkal pemasukan dan penyebaran hama dan penyakit, sedangkan fasilitasi ekspor produk pertanian merupakan tugas tambahan.
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meninjau Permentan mengenai Rekomendasi Impor Produk Hortikultura dan melakukan perbaikan dengan mengatur kewajiban importir produk hortikultura untuk memiliki gudang sendiri/sewa, bangunan pendingin untuk produk hortikultura yang diimpor.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengkaji mekanisme penetapan lokasi wajib tanam bawang putih maksimal 3 (tiga) hamparan dan tidak tersebar.
4. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk mengkaji kebijakan pengembangan bawang putih melalui mekanisme yang mewajibkan perusahaan importir bawang putih untuk menanam bawang putih yang sulit pengawasannya dengan menyediakan benih bawang putih bagi petani sebagai kompensasi dari ijin RIPH yg diperolehnya.
5. Komisi IV DPR RI mendukung upaya Pemerintah dalam pengembangan hortikultura yang dilakukan melalui berbagai skema maupun program yang lebih masif dengan tujuan penerima manfaat terbesar adalah petani.
6. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk menyusun peta pengembangan produk hortikultura nasional yang mengacu, antara lain sesuai agroekosistem dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani.
7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melaporkan rencana pengembangan sentra hortikultura yang mencakup rencana kebijakan operasional, tahapan/jadwal pembangunan infrastruktur; pelaksanaan

budidaya sampai dengan pemasaran; pola pengembangan; sarana dan prasarana pendukung dan anggaran yang bersumber dari pemerintah, swasta, dan petani.

8. Komisi IV DPR RI meminta agar jawaban tertulis, data, laporan, maupun hasil kajian yang diminta diserahkan selambat-lambatnya hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.30 WIB.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.
A-151

Direktur Jenderal Hortikultura
Kementerian Pertanian,

Ttd.

Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc.

Kepala Badan Karantina Pertanian
Kementerian Pertanian,

Ttd.

Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D.

a.n. Deputi II Bidang Koordinasi Pangan
dan Agribisnis Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Asisten Deputi Pengembangan
Agribisnis Hortikultura,

Ttd.

Yuli Sri Wilanti

Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan,

Ttd.

Heru Pambudi